

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian di atas, kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta ini sebenarnya sudah berjalan untuk upaya mengatasi masalah persampahan di DKI Jakarta, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum berjalan secara optimal dikarenakan ada yang tidak sesuai dengan target dan keterlambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan aspek dan indikator implementasi masih terdapat beberapa hambatan yaitu dari faktor komunikasi, masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak peduli terhadap informasi yang didapatkan dari kegiatan sosialisasi dikarenakan perbedaan kemampuan dalam menangkap informasi dan memahami informasi yang disampaikan juga berbeda.

Hambatan dari faktor sumber daya yaitu ketersediaan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah di level dinas yang masih kurang dibanding dengan analisis beban kerjanya dan sumber daya pendukung seperti sarana atau fasilitas yang juga masih kurang seperti kendaraan pengangkut sampah dan tong sampah pilah di lingkungan masyarakat. Untuk faktor disposisi, komitmen dan kesungguhan para pelaksana dalam melakukan implementasi dinilai sudah baik. Akan tetapi, sikap atau respon yang didapat dari masyarakat adalah masih adanya resistensi khususnya dalam KSD pembangunan FPSA. Hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak ingin adanya

fasilitas pengelolaan sampah di sekitar tempat tinggal mereka yang dikhawatirkan dapat terjadi pencemaran. Sedangkan dari indikator terakhir yaitu struktur birokrasi dapat dikatakan bahwa struktur organisasi sudah ditata dengan jelas dan dari ketiga KSD tersebut sudah ada masing-masing penanggung jawab ataupun yang ditugaskan untuk melaksanakannya, sehingga masing-masing bidang mempunyai tugas pokok dan fungsi saling terkait.

Jadi secara umum implementasi KSD pengelolaan sampah di DKI Jakarta belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator seperti faktor komunikasi dan sosialisasi yang dirasa kurang karena masih terdapat resistensi dari masyarakat, serta masih terdapat beberapa kendala dari faktor sumber dayanya yang masih kurang terutama fasilitasnya. Sehingga perlu dilakukan peningkatan dan komitmen yang penuh dalam menjalankan KSD pengelolaan sampah di DKI Jakarta.

4.2 Saran

Dari implementasi ketiga KSD tersebut tentunya ada kendala utama atau hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya, salah satunya adalah dari masyarakatnya itu sendiri yang masih kurang peduli terhadap permasalahan sampah di DKI Jakarta.

Oleh karena itu, dibutuhkan kordinasi dan komunikasi yang lebih intens serta mendalam antara Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana kebijakan dengan masyarakatnya sebagai penerima kebijakan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi yang lebih intens. Semuanya

harus terinformasi dengan baik, seperti capaian maupun tantangan yang dihadapi, sehingga pemerintah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan tentunya dapat bekerja bersama-sama mewujudkan ini sebagai gerakan masyarakat. Bukan hanya program pemerintah, tetapi gerakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk kebaikan bersama.

Selain itu, juga perlu diperhatikan dalam hal penambahan fasilitas maupun sarana dalam mendukung pengelolaan dan pengurangan sampahnya. Seperti halnya penambahan kendaraan pengangkut sampah dan tong sampah pilah di setiap lingkungan masyarakat, hal tersebut tentunya harus didukung juga dengan anggaran yang mencukupi. Penambahan juga harus memperhatikan pemerataan di setiap wilayah. Dalam hal pembangunan fasilitas pengelolaan sampah juga tidak lupa untuk menyusun rencana pengelolaan dampak lingkungan di dalam dokumen lingkungan sebagai strategi untuk meminimalisir pencemaran lingkungan.